



Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia

Rencana Kerja dan Anggaran (RENJA) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (BPPMHKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan **Tahun 2024**

#2024KKPBeyond



Pengantar

Di tahun 2024, kita mencapai akhir dari RPJMN 2020–2024 dan Renstra KKP 2020–2024. Pengembangan ekonomi dalam lima tahun mendatang diarahkan pada peningkatan ketahanan ekonomi dengan fokus utama produksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan ekspor. Dengan harapan akan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil, merata dan menjadi dasar yang kokoh untuk RPJMN 2025–2029.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia tentunya diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak peningkatan kinerja ekonomi nasional dan pemberian akses ekonomi yang luas bagi masyarakat, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan. Di sisi lain, daya dukung laut sebagai penyedia layanan ekosistem yang dimanfaatkan secara ekonomi oleh masyarakat akan semakin menurun apabila tidak ada tindakan untuk melindungi dan memperbaiki kerusakan. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia harus menempatkan ekologi sebagai panglima yang harus dijaga sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan oleh generasi bangsa di masa yang akan datang. Untuk itu, KKP telah merumuskan 5 (lima) kebijakan **Ekonomi Biru** yang bertujuan untuk menyeimbangkan ekonomi dan ekologi, yaitu: (i) Memperluas Kawasan Konservasi Laut; (ii) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; (iii) Pengembangan Perikanan Budidaya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan; (iv) Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta (v) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan.

Untuk mengimplementasikan kebijakan Ekonomi Biru tersebut, KKP telah menerima alokasi anggaran sebesar Rp7.103.764.437.000 pada APBN Tahun 2024, di mana angka tersebut mengalami penyesuaian menjadi Rp6.931.020.821.000 setelah realokasi dengan rincian belanja operasional sebesar 42% serta belanja program prioritas dan belanja *mandatory* yang wajib dialokasikan oleh UU untuk melaksanakan Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden sebesar 58%. Melalui postur anggaran tersebut, KKP diharapkan dapat mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan khususnya di sektor kelautan dan perikanan.



Daftar Isi









1. Arah Kebijakan KKP Tahun 2024	5
a. Tema dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	6
b. Indikator Kinerja KKP TA 2024	7
c. Kerangka Kebijakan Ekonomi Biru	8
2. Pagu Alokasi Anggaran KKP Tahun 2024	9
a. Pagu Anggaran KKP Tahun 2024	10
b. Pagu Anggaran KKP Tahun 2024 Pasca Realokasi ke Badan Karantina Indonesia	11
c. Pagu Anggaran KKP Tahun 2024 Pasca <i>Automatic Adjustment</i> (AA)	12
3. Postur Anggaran KKP Tahun 2024	13
a. Anggaran KKP Tahun 2024	14
b. Postur Anggaran Wajib/ <i>Mandatory</i>	15
c. Postur Anggaran Program Prioritas	16
4. Postur Anggaran Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2024	17
a. Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)	18










1. Arah Kebijakan KKP Tahun 2024

“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Arah Kebijakan Nasional

-  Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
-  Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
-  Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
-  Penguatan Daya Saing Usaha
-  Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
-  Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
-  Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
-  Pelaksanaan Pemilu 2024

Prioritas Nasional

-  Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
-  Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
-  SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
-  Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
-  Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
-  Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
-  Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kebijakan Ekonomi Biru

-  Memperluas Kawasan Konservasi Laut
-  Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota
-  Pengembangan Perikanan Budidaya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan
-  Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
-  Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan



Indikator Kinerja KKP TA 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET 2024
1	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP (indeks)	63,87
2	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	=<80
		3	Luas kawasan konservasi(Juta Ha)	29.30
3	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	4	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (%)	5 - 7
		5	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	7,2
		6	Konsumsi ikan (Kg/kapita/thn)	59,00
		7	Nilai PNBP sektor KP (Triliun Rupiah)	4,465
		8	Tenaga kerja yang terlibat (Orang)	489.211
4	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	9	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI (%)	72,00
5	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	10	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPPNRI)	11
		11	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	21
6	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	12	Produksi perikanan (Juta ton)	30,85
		13	Produksi garam (Juta ton)	2,00
		14	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)	99,00
		15	Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP (Triliun Rupiah)	10,85
7	Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif	16	Persentase Kepatuhan (<i>compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	98,00
8	Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	17	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP (nilai)	80,00
		18	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (nilai)	93,76



Kerangka Kebijakan Ekonomi Biru

Melindungi laut dan sumber dayanya

1

Memperluas Kawasan Konservasi Laut



Mengurangi tekanan dari aktivitas perikanan yang tidak ramah

2

Penangkapan Ikan secara Terukur Berbasis Kuota



3

Pengembangan Perikanan Budidaya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan



Menjaga kelestarian wilayah laut

4

Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



5

Pengendalian Sampah Plastik di Laut



Memperluas perlindungan, mengurangi tekanan/dampak negatif kegiatan manusia, melestarikan dan menjaga kualitas ekosistem laut dan layanan ekosistemnya

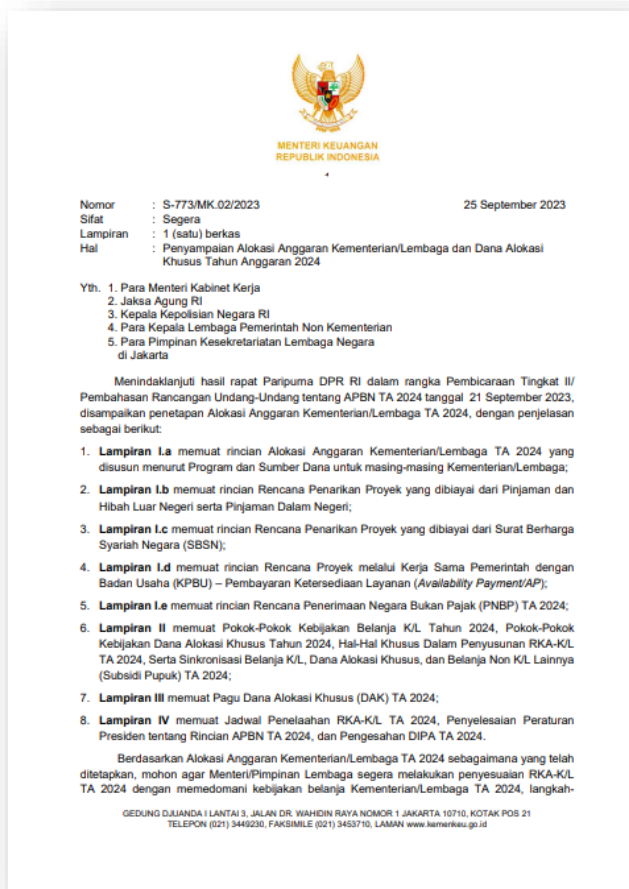


2. Pagu Alokasi Anggaran KKP Tahun 2024



Pagu Anggaran KKP Tahun 2024

Surat Menteri Keuangan Nomor S-773/MK.02/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024



Alokasi Anggaran KKP TA 2024

Rp7.103.764.437.000



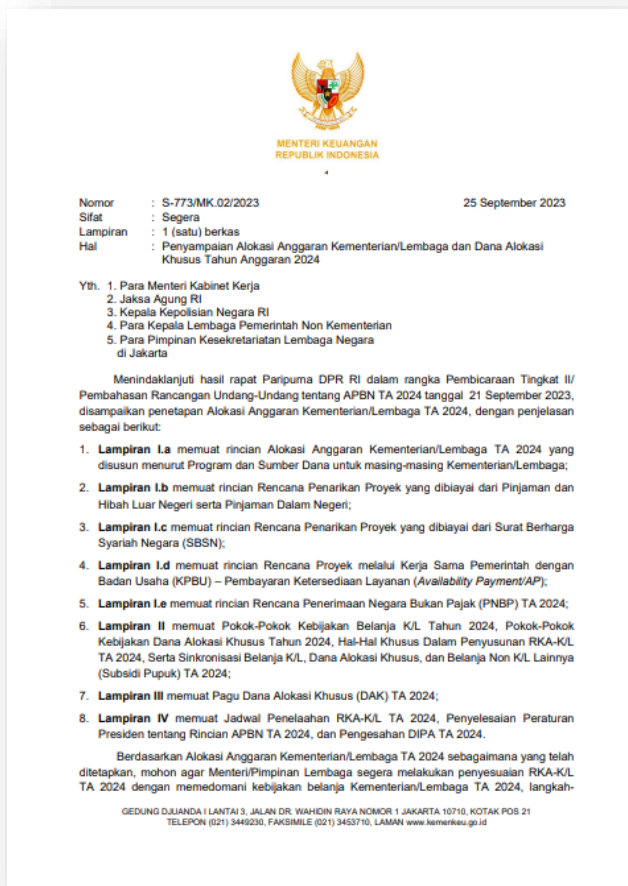


Pagu Anggaran KKP Tahun 2024 Pasca Realokasi ke Badan Karantina Indonesia

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1059/MK.02/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Persetujuan Perubahan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 Dalam Rangka Pergeseran Anggaran Antar Kementerian/Lembaga Pada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Karantina Indonesia dan Nota Dinas Plt. Kepala BPPMHKP Nomor 34/BPPMHKP/RC.420/I/2024 tanggal 10 Januari 2024, realokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Badan Karantina Indonesia adalah sebesar Rp172,74 miliar.

Alokasi Anggaran KKP TA 2024

Rp6.931.020.821.000



Pagu Anggaran KKP Tahun 2024 Pasca Automatic Adjustment (AA)

Tindak lanjut hasil penelaahan dengan Ditjen Anggaran Kemenkeu

(dalam Ribu Rupiah)

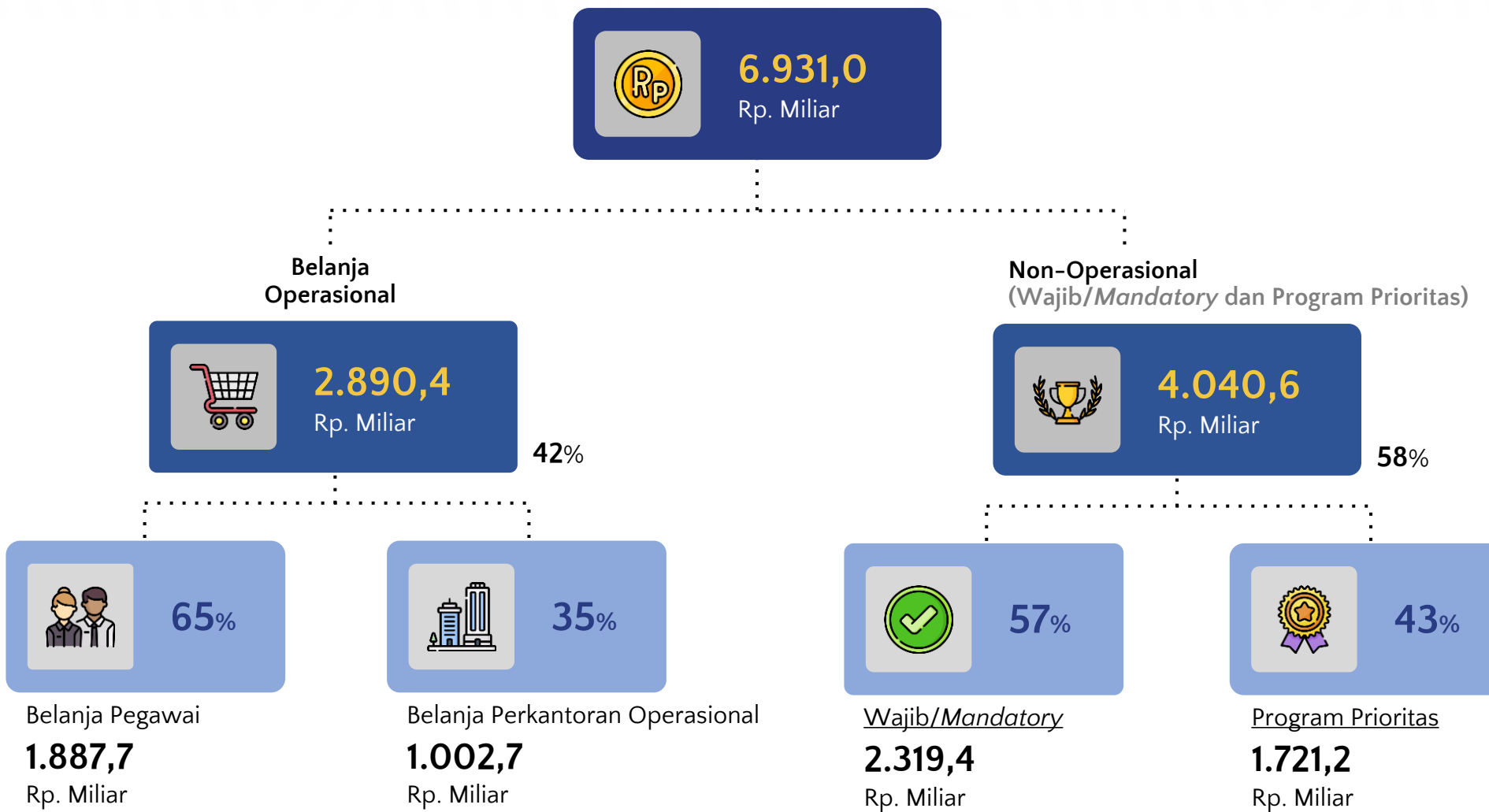
Eselon I	Pagu Awal	Pagu Pasca Perpindahan ke BKI	Automatic Adjustment	Pagu Efektif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
SETJEN	659.661.999	659.661.999	74.183.696	585.478.303
ITJEN	87.254.343	87.254.343	1.534.750	85.719.593
DJPT	946.540.091	946.540.091	80.661.573	865.878.518
DJPB	1.223.170.407	1.223.170.407	68.367.918	1.154.802.489
PSDKP	1.141.397.068	1.141.397.068	83.004.572	1.058.392.496
PDS	386.899.151	386.899.151	57.043.865	329.855.286
PKRL	657.638.033	657.638.033	63.578.503	594.059.530
BPPSDMKP	1.471.584.111	1.471.584.111	56.620.338	1.414.963.773
BPPMHKP	529.619.234	356.875.618	20.143.833	336.731.785
Total	7.103.764.437	6.931.020.821	505.139.048	6.425.881.773



3. Postur Anggaran KKP Tahun 2024

Anggaran KKP Tahun 2024

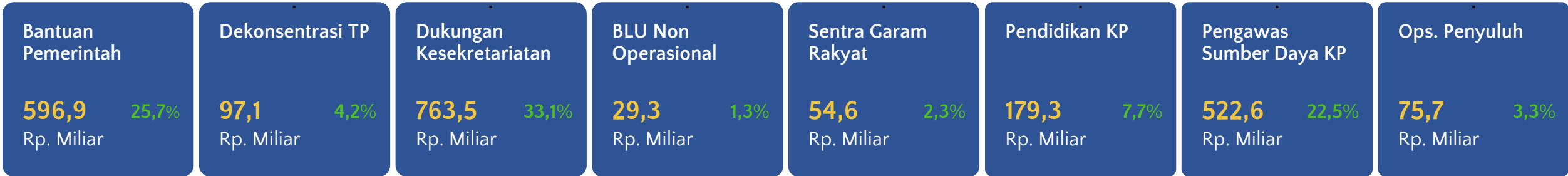
Pagu Alokasi Anggaran KKP 2024



Wajib / Mandatory




2.319,4
Rp. Miliar



DJPT	131 M	DJPT	23,6 M	DJPT	97,8 M	BPPSDMKP	17,77 M	DJPKRL	54,6 M	BPPSDMKP	179,3 M	DJPSDKP	522,6 M	BPPSDMKP	75,7 M
DJPB	327,3 M	DJPSDKP	4,4 M	BPPSDMKP	65,37 M	SETJEN	11,46 M								
DJPKRL	13,48 M	SETJEN	12,3 M	SETJEN	298,5 M										
DJPDSPKP	55,5 M	DJPB	21,36 M	DJPB	77,19 M										
DJPSDKP	5,5 M	DJPDSPKP	16,61 M	DJPSDKP	65,5 M										
BPPSDMKP	47,95 M	DJPKRL	19,12 M	DJPDSPKP	42,88 M										
BP2MHKP	13,5 M			DJPKRL	46,27 M										
SETJEN	5,5 M			BP2MHKP	27,48 M										
				ITJEN	45,5 M										

Program Prioritas



 **1.721,2**
Rp. Miliar

Perluasan Kawasan Konservasi Laut
 **73,17**
Rp. Miliar

DJPKRL	66,5 M
DJPSDKP	4,9 M
BPPSDMKP	1,7 M

Penangkapan Ikan Terukur
 **747,60**
Rp. Miliar

PIT	544,4 M	KALAMO	203,2 M
DJPT	218 M	DJPT	100 M
DJPDSPKP	48,9 M	DJPB	2,8 M
DJPSDKP	234,5 M	DJPKRL	6 M
BPPSDMKP	11 M	DJPDSPKP	65,4 M
BP2MHKP	31,8 M	DJPSDKP	3 M
SETJEN	0,1 M	BPPSDMKP	20 M
		BP2MHKP	3 M
		SETJEN	3 M

Budidaya Laut, Pesisir, dan Payau
 **567,07**
Rp. Miliar

DJPB	477,3 M
DJPDSPKP	64,3 M
DJPSDKP	3,6 M
BPPSDMKP	11,1 M
BP2MHKP	10,7 M

Pengawasan dan Pengendalian PPPK
 **300,88**
Rp. Miliar

DJPKRL	279,4 M
DJPSDKP	12,5 M
BPPSDMKP	9 M

Pengelolaan Sampah Plastik di Laut
 **32,51**
Rp. Miliar

DJPKRL	22,5 M
DJPB	0,1 M
DJPT	1,5 M
DJPSDKP	1,9 M
BPPSDMKP	2,3 M
BP2MHKP	4,2 M



Eselon I

BPPMHKP

Total Pagu Tahun 2024
Rp 0,36 triliun

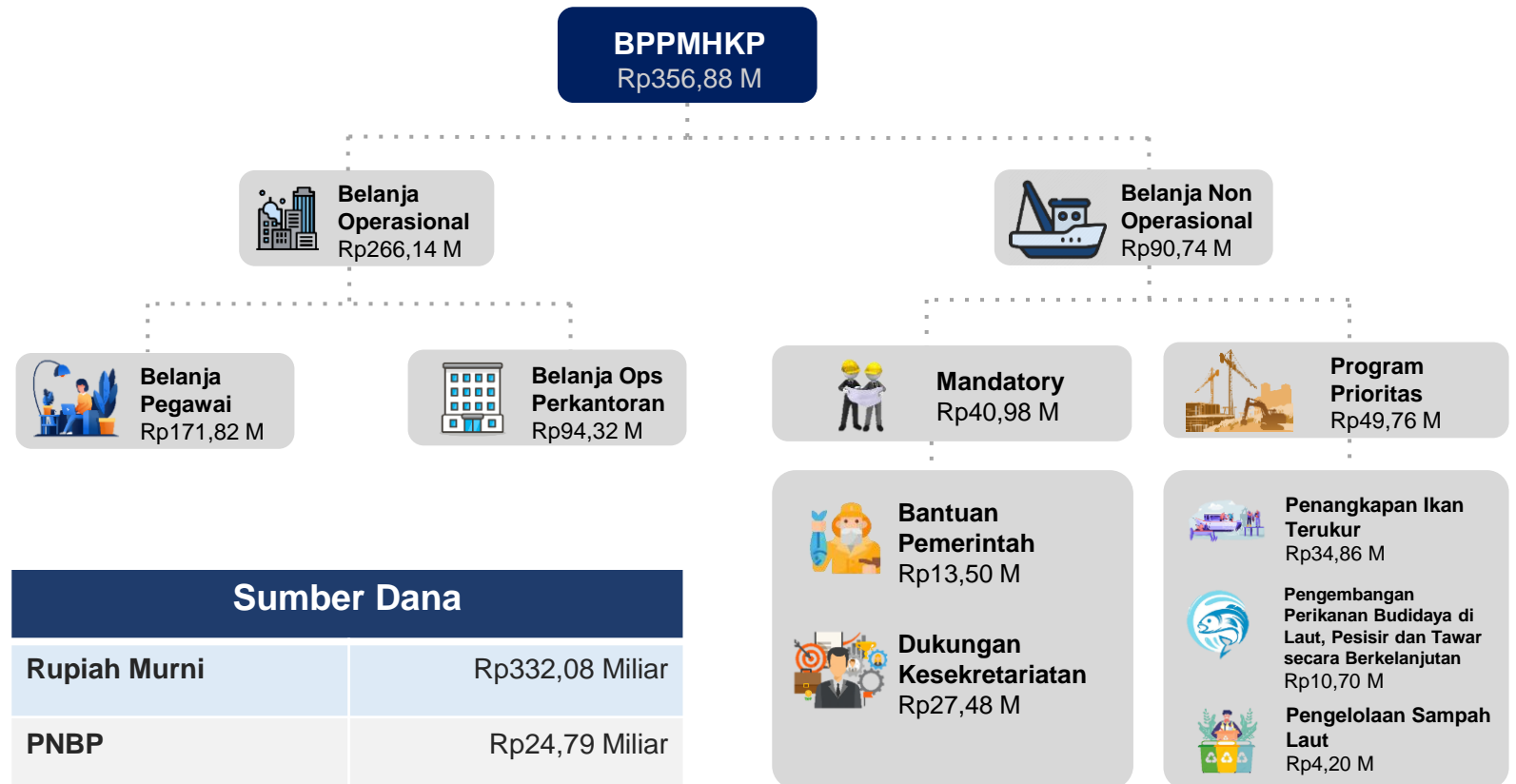
Persentase Anggaran



■ Program Prioritas ■ Mandatory ■ Belanja Pegawai ■ Belanja Perkantoran

Relevansi terhadap IKU KKP Tahun 2024

- Nilai PNBP Sektor KP
- Tenaga Kerja yang Terlibat
- Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor
- Nilai Kinerja RB KKP
- Nilai IKPA KKP



Sumber Dana

Rupiah Murni	Rp332,08 Miliar
PNBP	Rp24,79 Miliar



Program Prioritas	Rincian Kegiatan	Nilai pagu (Rp juta)	Target	PIC	Waktu pelaksanaan
Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota	Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dikembangkan Kapasitasnya	5.000	35 Paket	Pusat Pengendalian Mutu	Januari-Juli
	Pengendalian Ketertelusuran (<i>Traceability</i>) Produk Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Memenuhi Jaminan Mutu Hasil Perikanan	3.000	500 Unit	Pusat Pengendalian Mutu	Februari – Desember
	Sertifikasi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	11.056	3000 Sertifikat	Pusat Pengendalian Mutu	Februari – Desember
	Usaha Perikanan yang Menerapkan <i>Quality Assurance</i> Sesuai Standar, Sistem dan Regulasi	7.800	58 Unit	Pusat Standarisasi sistem dan Kepatuhan	Februari – Desember
	Monitoring/Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Tempat Pendaratan Ikan	5.000	35 Lokasi	Pusat Pengendalian Mutu dan Pusat Standarisasi sistem dan Kepatuhan	Februari – Desember
	Seritifikat HACCP, UPI dengan <i>traceability</i> , dan supplier dengan CPIB di lokasi Kampung Nelayan Modern	3.000	10 Lokasi	Pusat Pengendalian Mutu	Februari – Desember
Pengembangan Budidaya Berkelanjutan	Standarisasi Produk/Pelaku Usaha/Unit Usaha di Kampung Perikanan Budidaya dan Sentra Produksi	200	1 Paket	Pusat Standarisasi sistem dan Kepatuhan	Februari – Desember
	Monitoring Residu dan Bahan Berbahaya di Sentra Budidaya	3.000	160 Lokasi	Pusat Pengendalian Mutu	Februari – Agustus
	Penambahan Ruang Lingkup Pengujian Mutu dan Kesehatan Hasil Perikanan	7.500	50 Parameter	Pusat Standarisasi sistem dan Kepatuhan	Februari – Desember



Mandatory	Rincian Kegiatan	Nilai Pagu (Rp juta)	Target	PIC	Waktu pelaksanaan
Pengelolaan Sampah Plastik di Laut	Unit Kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengujian dan Pengendalian Mutu Laboratorium dan Standar Pelayanan	4.200	30 Laboratorium	Pusat Standarisasi sistem dan Kepatuhan	Februari – Desember
Bantuan Pemerintah	Bulan Bakti Mutu dan Bimtek Standardisasi Mutu Produk KP	13.500	55 Paket	Pusat Pengendalian Mutu	Januari – Maret
Dukungan Kesekretariatan	Dukungan Kesekretariatan BPPMHKP	32.678	1 Tahun	Sekretariat BPPMHKP	Januari – Desember

Tim Penyusun

Pembina

Komjen. Pol. Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, SH., MH., MBA.

Ketua

Dr. Andy Artha Donny Oktopura ST., MT., M.Eng.

Sekretaris

Muhammad Ramli, S.Pi., M.Si.

Anggota

Dr. Kusdiantoro, S.Pi., M.Sc.

Trian Yunanda, S.Pi., M.Sc.

Gemi Triastutik, S.Pi., M.P.

Machmud, SP, M.Sc.

Ir. Suharta, M.Si.

Dr. Rudi Alek Wahyudin, S.Pi., M.Si.

Ir. Hari Maryadi, M.Si.

Ir. Ivy Silfia Irani, M.Si.

Prita Aulia Novita, S.Kom., M.E.S.M.

Ridwan Yudhaprayoga, S.Pi., M.Sc.

Ilham Hermanda, A.Md.Ak.

Kurnia Kartika Sari, S.Pi.

Helman Wijaya, S.Si.

Yusmansyah, S.Pi., M.P., M.Sc.



Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republic of Indonesia